

## **Pandangan *Human Security* terhadap Komunikasi dan Implementasi Kebijakan Maritim: Studi Kasus Penggunaan Pukat Harimau di Laut Aceh**

**Khairur Rizki**

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Indonesia  
krizki@unram.ac.id

### ***Human Security Perspective on Communication and Implementation of Indonesian Maritime Policy: Case Studies on Illegal Fishing in Aceh Sea***

#### **ABSTRACT**

*This paper discusses the implementation and communication of Indonesia's maritime policy in the sea territory of West Aceh Regency which is faced with illegal fishing practices by local fishermen. The maritime policy is Indonesia's effort in maintaining the security of its territorial waters in any form, including in the case of destruction of marine ecosystems. This paper describes the implementation and communication of the policy in the western Aceh sea area from the concept of Human Security which in its implementation involves groups that are considered capable of being a "mouthpiece" or spokesman of the government to the community. It will also be described how the situation of the use of trawlers and their impacts and how to then measure the implementation of maritime policy through Human Security in providing security for humans.*

**Keywords:** *Human Security; maritime policy; policy communication; illegal fishing; Aceh sea*

#### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas kebijakan maritim Indonesia pada wilayah Laut di Kabupaten Aceh Barat yang dihadapkan dengan kasus penggunaan pukat harimau (*illegal fishing*) oleh nelayan setempat. Kebijakan maritim merupakan upaya Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah perairannya dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal perusakan ekosistem laut. Tulisan ini mendeskripsikan implementasi dan komunikasi kebijakan tersebut di wilayah laut Aceh barat dari sudut pandang konsep *Human Security* yang dalam pelaksanaannya melibatkan kelompok-kelompok yang dianggap mampu menjadi "penyambung lidah" pemerintah ke masyarakat. Akan digambarkan pula bagaimana situasi penggunaan pukat harimau dan dampaknya serta bagaimana kemudian mengukur implementasi kebijakan maritim tersebut melalui kacamata *Human Security* dalam memberikan rasa aman bagi manusia.

**Kata Kunci:** *Human Security; Kebijakan Maritim; Komunikasi kebijakan; Pukat Harimau; Laut Aceh*

**Received:** 27-04-2020

**Revision:** 11-05-2020

**Acceptance:** 22-05-2020

**Published online:** 30-05-2020

## **PENDAHULUAN**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah sebuah program pembangunan dunia yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai dengan 169 target. Target serta tujuan dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai macam realitas nasional, serta kapasitas

dan tingkat pembangunan yang berbeda dan tetap menjaga dan menghormati kebijakan dan prioritas nasional suatu negara yang meratifikasinya. Tujuan dan target SDGs tidaklah berdiri sendiri, tetapi diperlukan adanya implementasi yang terpadu. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 yang menggantikan atau melanjutkan program yang sebelumnya yang bernama MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang telah disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGDs sekarang diganti dengan SDGs. SDGs kemudian secara tidak langsung menjadi alat ukur global untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia terutama di negara dunia ketiga seperti Indonesia.

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menghindari keterlambatan implementasi SDGs yang disebabkan dalam mengimplementasikan MDGs yang terjadi di Indonesia mengalami keterlambatan selama 10 tahun yang dimulai sejak pengesahannya pada tahun 2000 silam. Dalam hal ini disebabkan karena Indonesia pada saat itu masih dalam proses pemulihan akibat terjadinya krisis pada tahun 1998 yang terjadi pada saat itu. Salah satu tujuan dari SDGs ini adalah menjaga ekosistem laut. Laut merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Dimana manusia sangat membutuhkan hal ini, baik untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun untuk kebutuhan ekonomi. Laut harus dapat dijaga dan dikelola dengan baik karena laut merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Laut merupakan mesin penggerak kehidupan bumi. Lautan yang menutupi lebih dari 70% wilayah bumi merupakan pengatur iklim global, sumber makanan nabati dan hewani, sarana penghubung antar pulau, bahkan masih banyak hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan laut yang masih perlu diungkap untuk lebih dapat menyokong kehidupan umat manusia. Keuntungan yang didapatkan dari sumber daya laut yang memiliki kekayaan yang besar ternyata memberi keuntungan dari segi ekonomi jika dikelola secara profesional dan melibatkan semua unsur yang memiliki kepentingan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah lautan yang cukup luas, memiliki banyak sekali sumber daya yang terkandung di dalamnya, salah satunya ada potensi ikan yang terdapat di lautannya. Hal ini menyebabkan banyak kasus-kasus seperti *illegal fishing* atau pencurian hasil ekosistem laut Indonesia secara illegal sering terjadi di laut Indonesia, yang sebagian besar di lakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia. Bahkan nelayan Indonesia sendiri juga kerap kali melakukan eksploitasi hasil ekosistem laut dengan tidak mengiktui standar keamanan sehingga memberikan dampak berupa kerusakan ekosistem laut di Indonesia. Salah satu kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia adalah kasus *illegal fishing* yang terjadi di Aceh. Provinsi Aceh secara geografis terletak di ujung barat Indonesia, berbatasan dengan Selat Malaka di bagian timur, Samudera Hindia di bagian barat dan pantai utaranya berbatasan dengan Teluk Benggala. Wilayah pesisirnya

memiliki panjang garis pantai 1.660 km dengan luas wilayah perairan laut seluas 295.370 km<sup>2</sup> terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km<sup>2</sup>.

Kegiatan perikanan yang ada di Provinsi Aceh didominasi oleh kegiatan perikanan usaha kecil. Dewasa ini pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan terhadap ketersediaan sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan daya dukung lingkungan pada setiap perairan. Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan juga adanya regulasi tentang tingkat pemanfaatan pada setiap wilayah perairan yang akan dikembangkan menjadi daerah penangkapan ikan. Potensi sumberdaya yang sedemikian besar sangat diperlukan pengembangan yang lebih terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (nelayan) dengan tidak mengabaikan faktor keberlanjutan dan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini patut selalu menjadi pertimbangan dalam melakukan suatu usaha pengembangan perikanan karena mempunyai dampak positif ke depannya. (Ali Said, dkk., 2016)

Penerapan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tentu memiliki keterkaitan dengan keamanan manusia (*Human Security*). Dalam hal ini, aspek-aspek yang ingin di capai dalam SDGs tentu juga mendukung bagi berjalannya konsep keamanan manusia. 17 tujuan yang ingin di capai dalam SDGs , memiliki keterkaitan secara langsung bagi keamanan manusia. Misalnya tujuan-tujuan seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan, kelaparan, akses pendidikan, keamanan lingkungan baik darat maupun laut dan lainnya merupakan bagian dari konsep keamanan manusia. Keamanan manusia didasarkan pada pengakuan mendasar dari berbagai kapasitas, kebutuhan dan keadaan orang, masyarakat sipil dan Pemerintah. Itu berusaha untuk membangun solusi partisipatif yang melindungi dan memberdayakan semua orang. Konsep keamanan manusia berfungsi dan berkaitan dengan program dan kerangka kerja SDGs yang dapat memperkaya mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan dari SDGs tersebut. Keamanan manusia, berdasarkan visi intinya untuk mencapai kebebasan dari rasa takut, keinginan dan penghinaan, dapat membantu mengatasi tantangan yang berasal dari konflik yang terus-menerus, marginalisasi dan kemiskinan. Hal tersebut menekankan pada segitiga hubungan antara perdamaian dan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia, menyoroti koneksi yang sangat diperlukan. Hal ini berarti dalam konsep keamanan manusia , misalnya yang ingin mendapatkan keadilan baik dalam segi ekonomi maupun lainnya dapat diselesaikan melalui pembangunan berkelanjutan (SDGs). (PBB, <https://www.un.org/humansecurity/agenda-2030/>, akses 12 Desember 2019)

*Human Security* atau keamanan manusia sendiri merupakan sebuah konsep, bagian dari disiplin ilmu Hubungan Internasional, yang kemudian menjadi alat untuk menciptakan rasa aman untuk manusia. Konsep *Human Security*, terkonsentrasi pada proteksi manusia dari krisis bahaya ancaman kehidupan, dan bahwa manusia harus merasa aman dan dan bebas dalam kehidupan sehari-harinya. Keamanan manusia adalah pusat keamanan dimana prinsipnya terfokus pada masyarakat kemudian individu dan kelompok umum. Namun,

dengan semakin adanya perkembangan zaman maka isu ancaman terhadap keamanan manusia pun semakin meningkat. Dengan demikian, *Human Security* sangatlah perlu diberi perhatian lebih. Ancaman-ancaman tidak hanya datang dari faktor eksternal juga datang dari faktor internal seperti kelaparan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. (OCHA, 2009)

Dalam konsep keamanan manusia atau *Human Security* terdapat 7 kategori didalamnya, yang berkaitan dengan *Human Security*, yaitu Keamanan Ekonomi, Keamanan Pangan, Keamanan Kesehatan, Keamanan Lingkungan, Keamanan Pribadi, Keamanan Komunitas atau Kelompok, dan Keamanan Politik. Ketujuh hal ini saling berhubungan satu sama lain, yang mana saling berkaitan dalam mewujudkan keamanan manusia yang diharapkan oleh konsep ini. *Human Security* kemudian menjadi salah satu acuan dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* di tahun 2030.

Dalam pelaksanaannya juga akan membutuhkan pihak-pihak yang akan mengantarkan pesan tentang kebijakan ini dan pentingnya rasa aman dari pandangan *Human Security* kepada masyarakat Aceh. Aksi ini dilakukan agar masyarakat benar-benar memahami tentang ancaman yang dihadapi jika tetap melakukan aksi Illegal fishing di daerah tersebut. Selain Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, tokoh – tokoh local dan media juga berperan dalam memberikan edukasi ke masyarakat sehingga kesepakatan global seperti SDGs mampu dipahami oleh warga lokal. Di Aceh sendiri salah langkah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga tradisional yang dikenal dengan sebutan Panglima Laot.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana akan menjelaskan bagaimana konsep *Human Security* yang digunakan menjadi satu perspektif dalam melihat sejauh mana pemerintah Indonesia berhasil dalam mengimplementasikan Kebijakan Maritimnya. Lebih tepatnya penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan maritime Indonesia mampu menyelesaikan masalah terkait penangkapan ikan menggunakan pukat harimau yang dilakukan di laut barat Aceh dan memberikan dampak berupa kerusakan ekosistem laut disana. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer berasal dari pernyataan resmi dari PBB dan juga regulasi yang ada di Indonesia sedangkan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku - buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi serta melalui media internet yang penulis anggap berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Semua data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan digeneralisasikan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Maritim**

Dalam rangka mendukung program pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu salah satu tujuan SDGs menjaga dan Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan, Indonesia sebagai salah satu negara maritim di dunia dengan memiliki wilayah lautan yang sangat luas dan sumber daya laut seperti terumbu karang, ikan dan lainnya terkandung sangat banyak di Laut Indonesia dan Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelago state*) terbesar di dunia dengan luas laut mencapai 6,32 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 99 ribu km terdiri dari kurang lebih 17.504 pulau, tentu keamanan dan pelestarian sumber daya dan ekosistem laut sangat diperhatikan bagi Indonesia. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015)

Kesehatan dan keamanan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia maupun bagi ekosistem lingkungan. Sebelum lebih jauh lagi, kami akan membagi menjadi dua mengenai resiko dan kewanaman laut. Jenis pertama dari resiko dan ancaman yang mampu mempengaruhi keamanan maritim timbul dari tindakan yang disengaja yang bersifat kriminal, seperti Terorisme, Penyelundupan, Pembajakan, Pertambahan Penduduk, tindakan melawan warisan budaya bawah air, imigran gelap, ancaman dunia maya serta eksploitasi SDA laut ilegal. Sedangkan Tipe kedua adalah risiko atau ancaman yang terjadi secara kebetulan atau tidak disengaja, dijelaskan oleh perilaku dan kondisi alam lingkungan, contohnya bencana alam dan kecelakaan maritim. (Utama, Makalah, 2016)



Gambar 1. Resiko dan Ancaman Terhadap Keamanan Maritim Nasional

Selain memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan, lautan juga mampu menghasilkan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, misalnya penyediaan makanan, kesempatan memancing bagi nelayan, produk alam, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi, mata pencaharian dan ekonomi daerah pesisir, sense of place, air bersih, dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, ekosistem laut sangat penting bagi Indonesia, sehingga hal tersebut sangat perlu untuk dijaga dan dipelihara (Sutopo, 2014).

Dalam upaya menjaga ekosistem laut dan mendukung berjalannya SDGs, Indonesia menerapkan salah satu kebijakan yaitu keamanan maritim. Keamanan Maritim awalnya

adalah sebuah konsep yang muncul ketika fungsi wilayah perairan yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia. Wilayah maritim menjadi salah satu hal yang paling penting dalam suatu negara, sehingga masalah keamanan maritim menjadi salah satu isu krusial bagi banyak negara di dunia, khususnya Indonesia sebagai negara maritim. Dengan potensi laut yang sangat tinggi, Indonesia harus menerapkan konsep keamanan maritim sebagai sebuah kebijakan dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan sebagai kepentingan nasional Indonesia, yaitu dalam menjaga bidang ekosistem laut secara berkelanjutan. Keamanan maritim juga mencakup dalam menjaga keamanan atas kedaulatan suatu negara di wilayah lautnya, misalnya menjaga dari ancaman kejahatan terorganisasi lintas negara pembajakan/perompakan laut, imigran gelap, perdagangan narkoba, penyelundupan serta pencurian ikan yang sering diidentikkan sebagai persoalan utama dalam keamanan maritim.

Dalam menerapkan keamanan maritim, Indonesia tentu melakukan berbagai upaya untuk mendukung tercapainya kebijakan tersebut sehingga dapat menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia. Kasus yang sangat krusial terjadi di Indonesia seperti *illegal fishing*, yang dilakukan oleh negara-negara tetangga misalnya Filipina, membuat Indonesia harus tegas dalam menerapkan kebijakan keamanan di wilayah lautnya, sehingga melalui kebijakan keamanan maritim tersebut, Indonesia dapat mencegah terjadinya kasus-kasus yang dapat merugikan Indonesia di wilayah laut.

Saat ini, tindakan *illegal fishing* yang dilakukan diperairan Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan jarring-jaring besar seperti pukat. Alat pukat ini sangat efektif dalam kegiatan *illegal fishing* karena bisa menjaring dengan banyak sekaligus, pukat yang biasa digunakan para pelaku ini adalah model trawl dan model pukat Tarik yang dimana jenis pukat ini bisa menjaring semua jenis species laut dengan semua ukuran seperti species ikan yang dilindungi, ubur-ubur bahkan kepiting bakau dan yang lainnya. Cara lain yang digunakan pelaku *illegal fishing* adalah menggunakan racun ikan atau bom ikan, dan tindakan ini menyebabkan rusaknya terumbu karang. Selain merusak terumbu karang cara ini juga dapat menyebabkan pencemaran air dari penggunaan bom ikan dan racun ikan air menjadi tercemar. Pencemaran pada air selain disebabkan oleh sampah juga bisa terjadi di laut seperti pada dasarnya yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yang berakibat membuat tercemarnya air laut dan mengancam pertumbuhan ekosistem laut dikarenakan air yang sudah tercemar oleh racun dan bahan kimia lainnya. (Nurmandi, 2015: 213 – 244)

### **Ekosistem Laut Aceh Barat**

Wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan melalui perairan dan laut yang sangat luas. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh negara Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dari kawasan laut, seperti Ikan, terumbu karang, garam, mutiara, minyak, dll. Selain itu, Indonesia juga memiliki keuntungan dengan memanfaatkan potensi dan keindahan laut bahari untuk menjadikan tempat-tempat

wisata. Wilayah perairan di Indonesia merupakan wilayah perairan yang memiliki ekosistem yang sangat beragam. Keindahan dan kelestariannya memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Aset dan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan Indonesia yang luar biasa tersebut diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel yang dilakukan oleh instansi yang menangani kelautan dan perikanan. Karena itu, untuk mengelola sumber daya alam tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan paham akan tugasnya. Guna mendorong dan mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Laut yang ada merupakan suatu ekosistem yang kaya dengan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan juga untuk kesejahteraan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa 70% permukaan bumi ditutupi oleh perairan dan lebih dari 90% kehidupan bio massa yang hidup di laut.

Oleh karena itu, lautan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Sebagian besar wilayah Indonesia yang wilayahnya terdiri dari perairan laut memiliki letak yang sangat strategis. Perairan laut di Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana penghubung lokal maupun internasional juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, mangrove, bahan tambang, dan daerah pesisirnya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Masalah kelestarian ekosistem laut merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius untuk dilindungi dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum yang merusak sumber daya di laut.

Kerusakan lingkungan laut terus terjadi di kepulauan Indonesia, ekosistem yang dieksploitasi biasanya tidak dilakukan upaya pelestariannya sehingga ekosistem laut akan terus-menerus mengalami kerusakan dan akhirnya menjadi punah. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya keragaman hayati laut, seperti pencemaran air laut akibat limbah, kolam ikan, daerah industri, pengeboman ikan dan peracunan terumbu karang. Keadaan seperti ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk terus melindungi kelestarian alam laut Indonesia. Tindakan-tindakan yang merusak laut (Illegal Fishing) seharusnya terus dilindungi dan ditindak tegas oleh pejabat daerah maupun pusat, agar kelestarian laut di seluruh daerah Indonesia bisa terjaga. Tidak hanya pemerintah, tanpa ada upaya serta kesadaran dari masyarakat dan kaum adat akan sulit untuk menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan di laut. Tentu, kerjasama dari masyarakat sekitar akan memberikan efek positif bagi keselamatan dan pengembangan lingkungan.

Tindakan penyelamatan dari beberapa daerah, seperti Aceh menjadi contoh yang bisa dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia, dengan menghindari konflik perpecahan antara daerah. Beberapa waktu sebelumnya, perusakan lingkungan laut sering terjadi di wilayah adat tersebut, penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, telah menimbulkan konflik antar sesama nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Penggunaan alat

tangkap tersebut, khususnya pukat harimau (trawl), menimbulkan gesekan antara nelayan yang pro dan kontra. Pada 6 Januari 2010, nelayan pro trawl berdemo di Polres menuntut dilepaskan nelayan yang ditahan karena menggunakan trawl. Sementara pada 14 Januari 2010 nelayan tradisional dari yang sudah berhasil meninggalkan trawl berdemo menuntut ditindak tegas para pengguna trawl. (Serambi Indonesia, 10 Desember 2010)

Gesekan secara fisik terjadi seiring dengan terjadinya pro dan kontra di kalangan nelayan. Ada beberapa bentuk konflik yang sudah terjadi di Aceh Barat, yakni: *Pertama*, sebanyak 20 unit boat yang menggunakan alat tangkap trawl yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak menangkap ikan di wilayah nelayan tradisional, ditangkap paksa oleh puluhan nelayan tradisional diperairan Aceh Barat, Sabtu (27 Desember 2008). Penangkapan yang dilakukan itu dalam upaya memberantas pukat harimau yang semakin marak digunakan oleh sebagian pengusaha (nelayan). *Kedua*, ratusan nelayan tradisional dari Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Minggu (4 Januari 2009) pagi melakukan razia besar-besaran di perairan laut Kecamatan Johan Pahlawan. Mereka berhasil menangkap 15 boat yang menggunakan alat tangkap trawl. *Ketiga*, puluhan nelayan tradisional Lhok Meulaboh hampir bentrok dengan awak pukat harimau yang datang dari Lhok Tapak Tuan karena diduga mereka menggunakan pukat harimau. (*Harian Waspada*, 2 Februari 2009)

Kondisi tersebut, tidak terjadi dengan sendirinya. Ada berbagai faktor yang mengelilingi permasalahan tersebut, salah satunya penggunaan alat tangkap trawl. Meskipun di Indonesia trawl dilarang, namun pada kenyataannya penggunaan trawl terus berlangsung. Di Aceh Barat, sebagian nelayan menggunakan trawl yang disebut dengan mini trawl. Ada sekitar 70 nelayan lokal di Samatiga dan Johan Pahlawan yang menggunakan mini trawl. Sedangkan nelayan di Meureubo dan Lambalek sudah menggantikan dengan alat tangkap ramah lingkungan. (Serambi Indonesia, 14 Desember 2009)

### **Komunikasi Kebijakan Maritim Aceh Barat**

Untuk menurunkan pesan dan nilai-nilai yang ada dalam kebijakan maritim di Indonesia agar dapat dipahami masyarakat membutuhkan pihak-pihak yang dianggap mampu dalam menerjemahkan hak tersebut. Selain dalam bentuk pemahaman dan pembinaan salah satu metode yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi. Pemberian sanksi yang berupa penyitaan alat tangkap pukat harimau dianggap sebagai usaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan bisa memberikan dampak buruk. Beberapa kali terjadi penyitaan pukat harimau yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Sat Pol Air Polres Aceh Barat, dan juga TNI AL. metode ini murni hanya menyita alat yang digunakan dan tidak memberikan sanksi pidana kepada para nelayan. Sebaliknya di Aceh Barat, nelayan yang alatnya disita bisa diberikan pembinaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat.

Satu hal yang menarik di Aceh adalah dengan hadirnya Panglima Laot (Panglima Laut). Panglima Laot adalah sebuah lembaga tradisional lokal yang dari dulu dianggap sebagai actor yang mengatur adat, hukum laut, dan kebiasaan menangkap ikan di Aceh, termasuk Aceh

Barat. Bagi masyarakat Aceh, Panglima Laot dianggap memiliki kuasa dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut. Lembaga Panglima Laot sendiri telah hadir di Aceh sejak abad 14.

Sangat masuk akal jika Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut mengajak Panglima Laot daerah Aceh Barat bekerjasama dalam melakukan konservasi di wilayah tersebut. Hal ini dianggap cukup efisien jika melihat pengaruh dan peran dari Panglima Laot terhadap masyarakat sehingga dengan menggunakan metode ini Pemerintah berhasil melakukan pengurangan penggunaan pukat harimau. Melalui survey yang dilakukan oleh Direktorat jendral tersebut, Panglima Laot mengklaim bahwa dengan menggunakan alat tradisional saja masih tetap memberikan untung kepada para nelayan. Selain itu alat tradisional juga lebih ramah terhadap ekosistem laut di Aceh Barat sehingga hal ini juga mendukung untuk mencapai rasa aman bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan terjaganya alam dan ekosistem laut maka akan menjamin pula hasil alam yang berkelanjutan.

Selain itu bentuk-bentuk sosialisasi juga peraturan dan perundang-undangan juga dilakukan melalui metode tatap muka, poster dan pamflet. Tidak hanya sampai disitu, Dinas Kelautan dan Perikanan di Aceh juga membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang diberikan tugas untuk mengawasi berbagai macam aktifitas nelayan dilaut maupun di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

### **Pandangan *Human Security***

Lingkungan berkaitan dengan upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan sebagai pendukung utama keberlangsungan hidup manusia. Apabila di dalam sebuah wilayah yang memiliki lingkungan kurang baik ataupun tidak sehat maka hal tersebut akan mengancam kehidupan manusia dari segi kesehatan. Tidak hanya itu lingkungan yang baik juga akan membentuk kehidupan yang lebih baik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena luas wilayah lautnya yang melebihi luas wilayah daratannya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tinggal disekitar pesisir bekerja sebagai nelayan. Hal tersebut memiliki kaitan yang erat terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemerintah Indonesia memberi perhatian lebih kepada ancaman-ancaman yang datang dengan kebijakannya mendukung adanya SDGs. Terlebih, pada tujuan SDGs point ke 14 yang fokus pada ekosistem laut guna melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia berkomitmen untuk terus menerapkan pertumbuhan yang berkelanjutan. (BPS, 2016:203)

Dengan adanya Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada point ekosistem laut, tentu ini menjadi hal yang sangat positif. Indonesia memastikan keberlanjutan kehidupan taman bawah lautnya akan terus terjaga, dimana laut Indonesia

memiliki jenis ikan paling banyak dengan terumbu karangnya yang indah. Dengan adanya SDGs akan banyak melahirkan formulasi-formulasi untuk melestarikannya, yang mana SDGs mampu menjamin keamanan lingkungan laut dan kehidupan dibawah laut. Melalui kebijakan Keamanan Maritim , pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan di kawasan laut, demi tercapainya keamanan, kenyamanan dan keuntungan bagi kehidupan manusia maupun bagi negara. Kebijakan keamanan maritim (*Maritime security*) adalah suatu kondisi lingkungan maritim yang bebas dari berbagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia dan penegakan hukum nasional dan internasional yang bertujuan menjamin terwujudnya kepentingan nasional Indonesia. ancaman ini berupa ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan ancaman pelanggaran hukum ancaman bahaya navigasi. Keamanan maritim khususnya dalam penjagaan ekosistem bawah laut tentu memiliki keterkaitan dengan keamanan manusia. (Anugrah, Jurnal Keamanan Maritim, No. 1, 2019)

Kebijakan keamanan maritim di laut Indonesia dan pelaksanaan kebijakan ini dengan berdasarkan konsep keamanan manusia, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan maupun terhadap keamanan lingkungan di wilayah laut. Dalam kebijakan keamanan maritim , pemerintah Indonesia melarang dan melawan salah satu kasus yang kerap sekali terjadi di wilayah laut Indonesia, yaitu *illegal fishing*. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang tegas dalam memberantas para pencuri ikan di wilayah Indonesia. Hal ini tentu dilakukan demi menjaga kedaulatan laut Indonesia, selain demi kedaulatan wilayah laut. Upaya tersebut dilakukan pemerintah Indonesia demi menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan dan mendukung program kerja SDGs kedepannya , demi keamanan lingkungan laut maupun demi kehidupan masyarakat di sekitar pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan setiap hari menangkap ikan di Laut, kemudian jika para pencuri ikan atau *illegal fishing* di wilayah Indonesia tidak ditindak secara langsung, maka para nelayan di wilayah Indonesia tidak mendapat keadilan, karena ikan akan habis di di tangkap oleh para pencuri ikan, selain itu penggunaan pukat harimau dalam menangkap ikan, baik dari nelayan lokal , maupun negara tetangga dapat merusak ekosistem laut maupun terumbu karang yang ada di Indonesia, oleh karena itu melalui kebijakan keamanan maritim ini, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengamankan wilayah laut Indonesia.

Penggunaan pukat harimau merupakan salah satu bentuk dari *illegal fishing* yang masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di laut Aceh. Tahun 2018, masih banyak terjadi kasus penangkapan kapal yang melakukan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut Aceh Barat dan kembali terjadi di tahun 2019 lagi penangkapan kapal yang melakukan pukat harimau untuk menangkap ikan di Wilayah Aceh Singkil. Penggunaan pukat ini seperti yang dijelaskan diatas sangat merusak ekosistem laut yang ada. Penangkapan ikan menggunakan trawl dan juga pukat Tarik serta menggunakan bahan beracun lainnya sangat bertentangan dengan kode etik penangkapan hasil laut. Tindakan tersebut sangatlah merugikan bagi sumber daya perairan yang ada dan juga memberikan dampak buruk bagi ekosistem

perairan namun hanya untung di nelayan saja. Penggunaan bom botol kecil saja nelayan setidaknya bisa mendapatkan 1 kuintal ikan, dan untuk botol besar bisa sampai 1ton ikan yang besar dan kecil. Tindakan itu semua membuat ekosistem dibawah laut menjadi rusak dan tidak stabil dan menyebabkan biota yang hidup dibawah laut hampir punah.

Dalam *Human Security*, penggunaan pukat harimau merupakan tersebut melanggar beberapa kategori dari *Human Security* tersebut. *Pertama*, tentu saja dalam kategori keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan berkaitan dengan keamanan manusia, hal ini dilihat dari degradasi lingkungan, bencana alam, polusi dan penipisan sumber daya alam, yang mana hal-hal tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Penggunaan pukat harimau ini masuk kedalam kategori degradasi lingkungan, polusi, dan penipisan sumber daya alam. Degradasi lingkungan yang terjadi dikarenakan bom air yang meledak debit volume air di lautan tersebut. Selain itu, terjadi perusakan terumbu karang, yang mana perusakan terumbu karang ini sangat merusak ekosistem laut yang seharusnya di jaga dan keseimbangan di laut jadi terganggu akibat banyaknya terumbu karang yang rusak. Selain itu, terjadi polusi air yang diakibatkan oleh pukat harimau ini tentu saja akan membahayakan ekosistem laut, hal ini dikarenakan kondisi laut yang sudah tercemar. Penipisan sumber daya alam, seperti ini dilihat dari banyaknya ikan yang berkurang akibat penggunaan pukat harimau tersebut. Penggunaan bom botol kecil saja nelayan setidaknya bisa mendapatkan 1 kuintal ikan, dan untuk botol besar bisa sampai 1ton ikan yang besar dan kecil. Tindakan itu semua membuat ekosistem dibawah laut menjadi rusak dan tidak stabil dan menyebabkan biota yang hidup dibawah laut hampir punah, dan bahkan berdampak pada terganggunya ekosistem laut dan biota laut yang bahkan dilindungi atau merupakan jenis species langka turut musnah sehingga sangat berpengaruh pada keberlangsungan makhluk hidup di perairan pada masa sekarang dan yang akan datang. (IKMI, 2015: 4)

*Kedua*, keamanan kelompok. Penggunaan pukat harimau juga berdampak pada keamanan kelompok. Kelompok yang terancam yaitu seluruh manusia yang masih membutuhkan ekosistem laut yang baik dan aman. Keamanan sekelompok manusia pada suatu daerah bisa menjadi ancaman jika ekosistem laut rusak. Banyak hal yang bisa terjadi apabila ekosistem laut terganggu bahkan bisa mengakibatkan kepunahan suatu kelompok, dikarenakan ketidakseimbangan alam akibat rusaknya ekosistem di dalam laut. Hal ini, berarti bahwa keamanan kelompok bisa sangat terancam akibat terjadinya *illegal fishing* tersebut. Selain itu kelompok nelayan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* tersebut juga sangat terancam keamanannya, keamanan mereka bisa terancam dari banyak hal termasuk dari pukat harimau yang bisa berakibat pada nelayan-nelayan tersebut.

*Ketiga*, keamanan individu. Keamanan individu tentu saja akan terancam karena adanya kegiatan *illegal fishing* tersebut, apalagi kegiatan tersebut menggunakan pukat harimau yang sangat berpotensi membahayakan individu nelayan tersebut. Selain keamanan individu nelayan tersebut yang terancam, setiap individu dari manusia akan

terancam. Dikarenakan ikan yang ditangkap menggunakan pukat harimau terancam terkontaminasi oleh racun-racun yang berada dalam bom yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* menggunakan pukat harimau tersebut. Selain dari ikan yang ditangkap, ikan-ikan yang ada juga bisa terkontaminasi racun yang tercecer akibat dari hasil kegiatan tersebut. Selain itu, keamanan individu akan terancam akibat minimnya ikan laut yang ada di dunia ini yang telah banyak berkurang akibat dari tindakan *illegal fishing* tersebut.

Selain ketiga keamanan tersebut, kategori keamanan yang lainnya pun akan terancam yaitu seperti keamanan pangan, yang diakibatkan oleh menipisnya sumber daya laut yang menyebabkan sedikitnya sumber makanan manusia yang dimiliki untuk kelangsungan banyaknya kehidupan manusia. Keamanan kesehatan, yang diakibatkan oleh ikan yang terkontaminasi racun yang ada, dan juga keamanan nelayan yang menggunakan alat tersebut yang sewaktu-waktu dapat terkena alatnya tersebut. Keamanan ekonomi, yang diakibatkan oleh perekonomian setiap individu yang bergantung pada sumber daya laut akan berkurang tiap harinya. Keamanan politik, yang diakibatkan oleh disalahgunakan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan untuk mencari suara dan bisa menyebabkan terjadi penyempitan pilihan bagi masyarakat.

Hal-hal diatas merupakan bagaimana *Human Security* melihat penggunaan pukat harimau yang mengancam keamanan manusia bagi setiap manusia. Kebijakan maritim merupakan suatu upaya untuk mewujudkan salah satu dari 17 SDGs yaitu ekosistem laut, yang mana tujuan ini ingin membuat suatu kondisi ekosistem lau yang baik dan aman, sehingga menyebabkan terjadinya keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan maritim ini juga merupakan upaya untuk menciptakan atau mewujudkan kategory-kategory dari keamanan manusia agar tercipta keamanan manusia bagi setiap manusia dilihat dari sektor ekosistem laut. Karena dalam konsep keamanan manusia, ancaman keamanan tidak hanya bagi manusia, namun keamanan lingkungan juga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia atau dapat mengancam keamanan manusia. Sehingga melalui kebijakan keamanan maritim ini, nantinya tentu akan mendukung keamanan lingkungan dan keamanan manusia itu sendiri dan juga mendukung tercapainya program kerja SDGs dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

## KESIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah lautan yang cukup luas, memiliki banyak sekali sumber daya yang terkandung di dalamnya, salah satunya ada potensi ikan yang terdapat di lautannya. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti *illegal fishing* sering terjadi di laut Indonesia, yang sebagian besar di lakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia. Salah satu kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia adalah kasus *illegal fishing* yang terjadi di Aceh. Dalam upaya menjaga ekosistem laut dan mendukung berjalannya SDGs, Indonesia menerapkan salah satu kebijakan yaitu keamanan maritim. Keamanan Maritim awalnya adalah sebuah konsep yang muncul ketika fungsi wilayah

perairan yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia. Wilayah maritim menjadi salah satu hal yang paling penting dalam suatu negara, sehingga masalah keamanan maritim menjadi salah satu isu krusial bagi banyak negara di dunia, khususnya Indonesia sebagai negara maritim. Dengan potensi laut yang sangat tinggi, Indonesia harus menerapkan konsep keamanan maritim sebagai sebuah kebijakan dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan sebagai kepentingan nasional Indonesia, yaitu dalam menjaga bidang ekosistem laut secara berkelanjutan. Keamanan maritim juga mencakup dalam menjaga keamanan atas kedaulatan suatu negara di wilayah lautnya, misalnya menjaga dari ancaman kejahatan terorganisasi lintas negara pembajakan/perompakan laut, imigran gelap, perdagangan narkoba, penyelundupan serta pencurian ikan yang sering diidentikkan sebagai persoalan utama dalam keamanan maritim. Pencurian ikan ini banyak kategorinya, salah satunya itu ialah *illegal fishing*.

Saat ini, tindakan *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan jarring-jaring besar seperti pukat harimau. Alat pukat harimau ini sangat efektif dalam kegiatan illegal fishing karena bisa menjaring dengan banyak sekaligus, pukat harimau yang biasa digunakan para pelaku ini adalah model trawl dan model pukat Tarik yang dimana jenis pukat ini bisa menjaring semua jenis species laut dengan semua ukuran seperti species ikan yang dilindungi, ubur-ubur bahkan kepiting bakau dan yang lainnya. Di Indonesia masih banyak terjadi kegiatan seperti ini, contohnya saja di Aceh. Beberapa waktu sebelumnya, perusakan lingkungan laut sering terjadi di wilayah adat tersebut, penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, telah menimbulkan konflik antar sesama nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Penggunaan alat tangkap tersebut, khususnya pukat harimau (trawl), menimbulkan gesekan antara nelayan yang pro dan kontra.

Melalui pendekatan *Human Security*, penggunaan pukat harimau dapat dilihat dari 7 kategori keamanan manusia. Pertama, keamanan lingkungan dilihat dari terjadinya degradasi lingkungan, bencana alam, polusi dan penipisan sumber daya alam, yang mana hal-hal tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Kedua, keamanan kelompok yang terancam akibat dari kegiatan ini yang mengurangi ekosistem laut yang ada. Ketiga, keamanan individu yang terancam tiap harinya akibat rusaknya ekosistem laut yang ada. Keempat keamanan pangan, yang diakibatkan oleh menipisnya sumber daya laut yang menyebabkan sedikitnya sumber makanan manusia yang dimiliki untuk kelangsungan banyaknya kehidupan manusia. Kelima keamanan kesehatan, yang diakibatkan oleh ikan yang terkontaminasi racun yang ada, dan juga keamanan nelayan yang menggunakan alat tersebut yang sewaktu-waktu dapat terkena alatnya tersebut. Keenam keamanan ekonomi, yang diakibatkan oleh perekonomian setiap individu yang bergantung pada sumber daya laut akan berkurang tiap harinya. Ketujuh keamanan politik, yang diakibatkan oleh disalahgunakan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan untuk mencari suara dan bisa menyebabkan terjadi penyempitan pilihan bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, P.T. (2019). “ Kebijakan Dan Strategi Keamanan Maritim “ *Jurnal Keamanan Maritim*. Vol 5. No.1. 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Jakarta: BPS.
- Budi, S. (2015) . *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2015*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik. 2015.
- DPR RI. (2016). *Buku Rekomendasi Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016*. Jakarta: DPR RI
- Human Security Unit. *Human Security In Theory and Practice*. New York. Journal: <http://ochaonline.un.org/humansecurity>.
- IKMI, (2015). ‘Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia,’ *Laporan Indeks Keamanan Manusia Indonesia, 2015*.
- Kkp. (2015). Mina Bahari Edisi 1. Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan, (STOP IUU (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing)).
- Nurmandi, A. (2015). Toward Community-based Wastewater Management Experience from Urban River Side Settlement in Yogyakarta City Indonesia.
- Rosadi, D. (2019). ‘Laut Aceh Singkil masih rawan illegal fishing, ditandai dengan penangkapan pukat harimau oleh tim gabungan’, *Tribun.news*, 15 November 2019 ,<https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/11/15/laut-aceh-singkil-masih-rawan-illegal-fishing-ditandai-dengan-penangkapan-pukat-harimau-oleh-tim-gabungan>, dikutip tanggal 15 Desember 2019.
- Said, A. (2016). “ Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 Sustainable Development Goals ) di Indonesia”. Jakarta: Penerbit Badan Pusat Statistik.
- Sutopo, A. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Penerbit Badan Pusat Statistik.
- United Nations. “ *Human Security and Agenda 2030*”. United Nations.org. 31 Mei 2018. <https://www.un.org/humansecurity/agenda-2030/> . ( diakses pada 12 Desember 2019).
- Utama, A. P. (2019). “ Konsep Keamanan Maritim Di Indonesia”, diakses pada 8 Desember 2019 [https://www.academia.edu/34756626/KONSEP\\_KEAMANAN\\_MARITIM\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34756626/KONSEP_KEAMANAN_MARITIM_DI_INDONESIA) .
- ‘Petugas sita 7 pukat trawl dari nelayan aceh barat’, *Beritakini.co*, 19 November 2018, <https://beritakini.co/news/petugas/sita/7/pukat/trawl/dari/nelayan/aceh/barat/>, dikutip tanggal 15 Desember 2019.